

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI BAROMETER  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**



Oleh

**SUHERNI**

105731135616

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI BAROMETER  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2022**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

"Fokus saja dengan tujuan yang ada di depanmu dan lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa lebih dekat dengan tempat yang kamu inginkan."

### Persembahan:

Karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua terkasih yang selalu hadir dan menjadi supporter terdepan dengan doa-doa dalam setiap proses hidup yang ku jalani, termasuk dalam proses studi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen, terkhusus pembimbing-pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Saudara serta seluruh keluarga yang mendukung baik secara material maupun non-material yang tentu berpengaruh bagi diri pribadi penulis.
4. Teman-teman dan sahabat yang setia memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian karya ilmiah ini



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Rasio Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa "

Nama Mahasiswa : **SUHERNI**

No. Stambuk/ NIM : 105731135616

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

*Menyatakan bahwa penelitian ini telah di periksa , dan diujikan didepan penguji Skripsi Strata (S1) pada tanggal 21 MEI 2022 Di Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas muhammadiyah Makassar.*

Makassar, 27 Jumaidil awal 1443 H

21 mei 2022 m

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Salim, HR, SE., M.M  
NIDN. 0911115703

Dr. Linda Arisanti Razak, SE., M.Ak., Ak.CA  
NIDN. 0920067702

Mengetahui



Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM 6510919118704507

Ketua Program Studi Akuntansi,

Mira, SE., M.Ak  
NBM: 1286844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi atas Nama **SUHERNI**, NIM : **105731135616** , diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1117/105/A.I-II/V/43/2022, Pada tanggal 27 Jumadil Awal 1442 H/ 21 MEI 2022, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

27 Jumadil Awal 1442 H

Makassar,

21 MEI

2022 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr.H. Andi Jam'an, SE.,M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM  
2. Dr. Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si,Ak.CA  
3. Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si,Ak.CA  
4. Mira, Se.,M.Ak.Ak

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr.H. Andj Jam'an, SE.,M.Si**  
**NBM.6510919118704507**



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHERNI**

Stambuk : 105731135616

Jurusan : **Akuntansi**

Dengan judul : "ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBAGAI

BAROMETER PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

GOWA "

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 25 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan

  
**SUHERNI**  
NIM.105731135616

Diketahui Oleh :

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi,



**Dr.H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**  
NBM-6510919118704507

**Mira, SE.,M.Ak**  
NBM: 1286844

## ABSTRAK

Suherni. 2020 Rasio Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Bapak Agus Salim Dan Ibu Linda Arisanti Razak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan. Tempat penelitian dilakukan yang beralamat di Jln. Tumanurung Raya No. 2, Kec, Somba Opu, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90174. Adapun waktu penelitian yaitu 2 (dua) bulan dari bulan januari 2022 sampai februari 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interpretif dengan metode deskriptif

Berdasarkan hasil analisis data maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan rasio efektivitas sngat efektif sedangkan berdasarkan rasio efisiensi sangat efisien. Adapun berdasarkan rasio aktivitas menunjukkan sangat relative besar. Sedangkan berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan.

Kata Kunci : Rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa



## ABSTRACT

*Suherni. 2020 Financial Ratios as a Barometer of Gowa Regency Regional Government Performance. Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Agus Salim and Mrs. Linda Arisanti Razak*

*This study aims to determine to analyze the financial performance of the Gowa Regency Government in 2016 to 2020 based on the effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, growth ratio. The place where the research was conducted is located at Jln. Tumanurung Raya No. 2, District, Somba Opu, Sungguminasa, Gowa Regency, South Sulawesi 90174. The research time is 2 (two) months from January 2022 to February 2022. The type of research used in this study is qualitative research and the approach used is interpretive approach with descriptive method.*

*Based on the results of data analysis, the results of this study indicate that the financial performance of the Gowa Regency Government in 2016 to 2020 is based on the effective sting effectiveness ratio while the efficiency ratio is very efficient. Meanwhile, based on the activity ratio, it shows that it is very relatively large. Meanwhile, based on the ratio of growth has increased and decreased.*

**Keywords:** *Effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, growth ratio as a Barometer of Gowa District Government Performance*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Menguasai semesta ini. Rasa syukur yang sangat besar penulis panjatkan atas limpahan kasih sayangNya, hidayah-Nya dan keridhaan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam rindu kepada utusan yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini berjudul **"Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa"** disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Penyusunan skripsi ini juga tidak dapat terselesaikan tanpa keterlibatan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang begitu besar penulis sampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agus Salim Harrang, SE., MM Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Linda Arisanti Razak, SE., M.Ak., Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang selama ini telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak lelah memberikan motivasi dan semangat serta bantuan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Suamiku dan anakku yang tak hentinya mengingatkan dan selalu mendukung dalam proses studi ini.

Kesadaran penulis atas tidak sempurnanya skripsi ini hadir karena penulis yakin bahwa tidak ada yang sempurna selain Allah SWT. Oleh karena itu, saran dan kritik dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk membantu menutupi vii keterbatasan dan kekurangan skripsi ini. Atas seluruh kesalahan yang ada, mohon maaf yang sangat besar penulis haturkan dari lubuk hati terdalam. Skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terkhusus bagi almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekian dan terimakasih.

Makassar, 10 Maret 2022

Penulis

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....
- B. Pendekatan Penelitian .....
- C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....
- D. Metode Pengumpulan Data .....
- E. Instrumen Penelitian .....
- F. Metode Analisis Data .....

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Hasil Penelitian .....
- B. Pembahasan .....

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Saran .....

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Stewardship Theory</i> .....	
B. Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	
C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	
D. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	
E. Penelitian Terdahulu .....	
F. Kerangka Pikir .....	

## DAFTAR TABEL

Judul

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....34



## DAFTAR GAMBAR

Judul

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....37

Gambar 4.1 Strukur Organisasi.....45



DAFTAR LAMPIRAN

Judul

Halaman



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Birokrasi di daerah kini memiliki hasrat besar guna memberi layanan yang berfokus pada *urgensitas* yang hadir ditengah-tengah masyarakat berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan pada sektor perekonomian sejak era reformasi dikobarkan. Hal ini bukannya tanpa alasan, mengingat *urgensi* tersebut telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Berangkat dari urgensi yang dituangkan dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah kemudian diharapkan mampu untuk mengoptimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerahnya, khususnya dari sisi kemandirian pengelolaan. Selain dari sisi kemandirian, kinerja keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan.

Rasio efektivitas (RE-PAD) merupakan tingkat capaian Pemerintah Daerah terkait dengan target realisasi PAD. RE-PAD ini merepresentasikan level mobilitas pemda terkait dengan realisasi PAD yang diekspektasikan (Nurhayati, 2015). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menjadi sangat penting guna melihat apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan Pemerintah Daerah tersebut dalam upaya memaksimalkan capaian target yang telah ditentukan (Pilat dan Morasa, 2017). Selanjutnya terkait dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rasio efisiensi (RE-KD) merupakan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait perbandingan biaya yang dialokasikan dengan pendapatan yang direalisasi.

Susanto (2019) menjelaskan bahwa REKD merepresentasikan komparasi antar besaran output dalam pemerolehan dengan target yang ditetapkan. Kedua rasio ini menjadi suatu hal penting yang harus benar-benar dibenahi bilamana ingin mendapatkan status sebagai daerah yang maju. Salah satu daerah yang kemudian patut menjadi sorotan adalah Kabupaten Maros yang merupakan salah satu daerah penyangga Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Meskipun selalu berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai patokan sebab hanya merepresentasikan penyajian laporan keuangan yang wajar. Selanjutnya terkait dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Rasio efisiensi merupakan capaian kinerja Pemerintah Daerah terkait perbandingan biaya yang dialokasikan dengan pendapatan yang direalisasi.

Susanto (2019) menjelaskan bahwa Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan atau belanja untuk memperoleh penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diterima. Sebelumnya defenisi yang kurang lebih sama disampaikan Lubis dan Hafni (2013) bahwa Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Selain dua rasio yang telah diuraikan, rasio lain yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah rasio aktivitas (RA-KD).

Nurhayati (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwasanya RAKD ini menjadi gambaran terhadap apa yang menjadi prioritas pemda, khususnya terkait dengan komparasi antar kebutuhan operasional dan investasi kebutuhan publik. Rasio ini menjadi sangat penting mengingat dari sini kita bisa melihat seberapa peduli pemerintah terhadap urgensi publiknya. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Selanjutnya,

Susanto (2019) menjelaskan secara singkat bahwa Rasio aktivitas menggambarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan secara proporsional. Semakin tinggi persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan publik) cenderung semakin kecil. Disamping ketiga rasio yang telah diuraikan tadi, dalam pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah juga dikenal dengan rasio pertumbuhan. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mampu menyerap serta

menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Gowa. Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Gowa ([gowakab.go.id](http://gowakab.go.id)) per tanggal 8 Maret 2017, di mana pemerintah Kabupaten Gowa dan beberapa Pemerintah Daerah lainnya mengeluhkan adanya Surat Edaran Menteri Keuangan (SE-10/MK/07/2016) tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Mandiri untuk Tahun Anggaran 2016. Diketahui jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gowa seharusnya Rp 160 Miliar namun harus dipotong sebesar 10% atau Rp 16 Miliar. Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Gowa harus menunda proses pelelangan proyek pada beberapa pekerjaan fisik. Keresahan terkait dengan pemotongan DAK ini menjadi suatu kewajaran, namun disisi lain hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa belum efektif dalam pengelolaan keuangannya karena masih bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan *gap object* (fenomena kinerja keuangan Kabupaten Gowa) dan *gap research* terkait dengan kinerja keuangan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti kemudian tertarik meneliti dengan judul "**Analisis Kinerja Keuangan sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Sulawesi selatan)**".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini kemudian disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio aktivitas?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio pertumbuhan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan fokus serta deskripsi fokus yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efektivitas.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efisiensi.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio aktivitas.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio pertumbuhan.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terkait pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi Pemerintah dan laporan realisasi berdasarkan anggaran dalam APBD.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga diharapkan membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam membuat anggaran APBD yang lebih efisien.

**2. Bagi Institusi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kekayaan khazanah referensi terkait dengan topik kinerja keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Universitas Muhammadiyah Makassar.

**3. Bagi Objek Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terkait dengan bagaimana kinerja keuangan yang dimiliki sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan Kabupaten Gowa yang lebih baik lagi ke depannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

### **A. Stakeholder Theory**

Ramizes dalam bukunya *Cultivating Peace*, mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder*. Friedman mendefinisikan *stakeholder* sebagai komunitas ataupun perorangan yang mampu memengaruhi atau menerima pengaruh dari suatu capaian target tertentu.

Terkait dengan penjelasan tersebut, *stakeholder* yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemerintahan daerah. Jika dikaji lebih lanjut, terdapat 2 (dua) *stakeholder* utama dalam suatu sistem pemerintahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Masyarakat**

Masyarakat merupakan *stakeholder* utama dalam suatu sistem pemerintahan berasaskan demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, apa yang kemudian diprogram dan dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan atas kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

#### **2. Pemerintah**

Pemerintah dalam hal ini dibagi atas 3 (tiga) elemen yakni Pemerintah Daerah itu sendiri, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Suatu pemerintahan tentu memiliki target organisasi yang harus dicapai yang didasarkan pada standar yang diturunkan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

### **B. Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

## 1. Defenisi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010:18). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 2013: 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Dalam PSAP No.4, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah merupakan bunyi dari pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Dari isi yang tercantum dalam pasal tersebut, kita dapat menemukan beberapa kalimat inti dari isi pasal ini diantaranya Mengurus sendiri urusan pemerintahan, Dilakukan berdasarkan asas otonomi, dan Dilakukan sebagai tugas pembantuan.

Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dari orde lama sampai dengan sekarang ini. Melalui konstitusi yang berlaku sekarang, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus diri sendiri urusan pemerintahan. Hal ini berarti segala kebijakan daerah yang meliputi banyak aspek dan bidang ditentukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengawasan pemerintah pusat.

Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undangan nomor 33 tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sehingga lahir tiga paket perundang-undangan, yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan.

Kemudian, keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akan menggantikan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi.

## 2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini sendiri, peneliti memfokuskan penelitian pada pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 (tiga) tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002: 121):

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Lebih lanjut, pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Abdul Halim 2007:230):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### C. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari

masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231). Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007: 232) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemerintah Daerah, bersedia member pinjaman maupun membeli obliges

Para pengguna laporan keuangan diberikan pula berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia.

Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terkandung dalam karakteristik Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah. Salah satu faktor tersebut adalah karakteristik Pemerintah Daerah. Sedangkan akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik dapat diidentifikasi sebagai

berikut: pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. Suprpto (2006:20) menyebutkan salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik khususnya Pemerintah Daerah adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2007:15). Pengertian analisis rasio keuangan

sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya.

Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial, sedangkan penggunaannya pada lembaga publik khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Menurut Halim (2004:24) analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan 4 (empat) analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Gowa selama tahun 2017-2019 sebagai berikut:

#### 1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah. Rasio Efektivitas dihitung menggunakan formulasi:

$$RE - PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio ini menjadi sangat penting guna melihat apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan Pemerintah Daerah tersebut dalam upaya memaksimalkan capaian target yang telah ditentukan (Pilat dan Morasa, 2017). Susanto (2019) menjelaskan bahwasanya kemampuan daerah dikatakan efektif bila rasio efektivitasnya yang dicapai minimal 100% atau

dengan kata lain semakin tinggi maka akan semakin baik. Tim Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM kemudian memberikan barometer efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

## 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$RE - KD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Tim Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM kemudian memberikan barometer efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Rasio Efisiensi	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90 – 100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

### 3. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Investasi} = \frac{\text{Belanja Investasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio aktivitas menggambarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan secara proporsional. Semakin tinggi persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana layanan publik) cenderung semakin kecil. Rasio ini berdasarkan

barometer yang ditetapkan oleh Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Kriteria Aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Perbandingan	Kriteria
Jumlah Belanja Operasi > Jumlah Belanja Investasi	Kurang Baik
Jumlah Belanja Operasi = Jumlah Belanja Investasi	Cukup Baik
Jumlah Belanja Operasi < Jumlah Belanja Investasi	Baik – Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t - 1}{\text{PAD Tahun } t - 1}$$

Rasio ini berdasarkan barometer yang ditetapkan oleh Litbang Departemen Dalam Negeri FISIPOL UGM, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Kriteria Rasio Pertumbuhan PAD**

No.	Persentase	Kriteria
1	76% - 100%	Baik
2	51% - 75%	Cukup Baik
3	26% - 50%	Kurang Baik
4	0% - 25%	Tidak Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri (2014)

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan penelitian atau referensi yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan terdiri dari beberapa jurnal penelitian yang dirangkum dalam tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Kusumadewi dan Ilat (2018) "Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1"	Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 2012-2016	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012-2016	Berdasarkan kinerja pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Berdasarkan kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dapat dinilai belum optimal dalam keserasian belanja.
2	Mega Oktavia Ropa (2018) "Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 2"	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data-data yang dihimpun dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2010-2012	Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktivitas, dan pertumbuhan dapat dikatakan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan tergolong cukup baik.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
3	Rahmawati dan Putra (2018)" Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.15.no 3"	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data-data yang dihimpun dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.	Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, dan rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif.
4	Tobi dan Idayanti (2018)" Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 5 No 8"	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data-data yang dihimpun dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012.	Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis kinerja Keuangan Daerah, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif Kemandirian Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
5	Hery Susanto (2019) "Jurnal EMBA. Vol. 1 No.4"	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
6	Nurhayati (2018)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data-data yang dihimpun dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009 – 2012.	Analisis Rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2009-2012 yang diukur melalui Rasio Kemandirian Daerah sangat rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi, Rasio Efektivitas tahun anggaran 2009-2012 sangat efektif sedangkan Rasio efisiensi tahun anggaran 2009-2012 sangat efisien, Rasio Aktivitas tahun anggaran 2009-2012 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja rutin lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
7	Juddy J. Pillat dan J. Morasa (2017)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa data-data yang dihimpun dari APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015.	Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2011-2015, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kota Manado berada dalam kondisi yang baik dengan trend positif atau baik.
8	Karlina dan Handayani (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012-2017	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan data sekunder berupa data-data yang dihimpun dari data APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012-2017.	Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2017, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kota Surabaya berada dalam kondisi yang baik dengan trend positif (sangat baik)

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
9	Putri K. D. Lubis dan N. Hafni (2017)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013	Penelitian merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2011-2013	Hasil analisis data menunjukkan adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013 dalam kategori rendah. Efektivitas keuangan daerah dalam kategori sangat efektif di tahun 2011 - 2012 dan tidak efektif di tahun 2013. Sedangkan efisiensi keuangan daerah berada pada kategori sangat efisien. Bila dilihat dari rasio belanja aktivitas / kecocokan pada periode 2011-2012, Kabupaten Labuhan Batu masih memprioritaskan pengeluaran rutin dibanding belanja modal. Selain pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun dan negatif di tahun 2013, Pemkab Labuhan Batu memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman karena memiliki DSCR di atas 250% setiap tahunnya.

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
10	Wenny Alvionita (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa	Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.	Kinerja Keuangan Kabupaten Gowa jika dilihat dari Rasio Efektifitas diketahui bahwa efektivitas keuangan APBD Kabupaten Gowa tahun 2013 dan 2014 berjalan belum Efektif Karena rasio efektivitasnya dibawah dari 100% yaitu sebesar 90,97 % dan 94,67 %. Sedangkan Tahun 2015 dan 2016 berjalan sudah efektif karena rasio efektivitasnya masih di sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 104,98% dan 103,07%. Jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2013 sampai dengan 2016 sebesar 94,16% atau dapat dikatakan kurang efisien. Berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2016 rasionya masing-masing sebesar 88,84%; 91,72%; 99,03%; dan 97,05%.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

		60-80%: Efisien <60%: Sangat Efisien
Aktivitas	$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$ $\text{Rasio Belanja Investasi} = \frac{\text{Belanja Investasi}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$	Kurang Baik: Rasio Belanja Operasi > Rasio Belanja Investasi Cukup Baik: Rasio Belanja Operasi = Rasio Belanja Investasi Baik: Rasio Belanja Operasi < Rasio Belanja Investasi
Pertumbuhan	$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t - 1}{\text{PAD Tahun } t - 1} \times 100\%$	76% - 100% : Baik 51-75% : Cukup Baik 26% - 50% : Kurang Baik 0% - 25% : Tidak Baik

3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.



## F. Metode Analisis Data

Analisis merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data adalah metode yang bersifat induktif dimana analisis data berdasarkan hasil informasi data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu, bila diterima dapat dikembangkan dari teori (Sugiyono, 2010:16). Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan dalam tiga tahap berikut :

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

### 2. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peneliti melakukan suatu kajian terhadap data yang telah disajikan untuk kemudian dibahas sesuai operasional dari masing-masing data yang dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 Analisis Data Penelitian**

Rasio	Operasional	Barometer
Efektivitas	$RE - PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$	>100%: Sangat Efektif 90-100%: Efektif 80-90%: Cukup Efektif 60-80%: Kurang Efektif <60%: Tidak Efektif
Efisiensi	$RE - KD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	>100%: Tidak Efisien 90-100%: Kurang Efisien 80-90%: Cukup Efisien

2013:145). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 148).

Sumber data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 2016-2020 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik tabulasi data yang diterapkan dengan cara mengumpulkan beragam data-data ataupun informasi yang menjadi bahan utama dilakukannya suatu kajian atau riset melalui berbagai sumber-sumber dengan kredibilitas yang mumpuni (Sugiyono, 2014).

##### **2. Studi Pustaka**

Pengumpulan data jenis ini dilakukan melalui riset literatur, yakni dengan menggali berbagai kebutuhan penelitian via jurnal, buku, artikel, internet, dan sumber lainnya yang ilmiah dan relevan dengan topik penelitian yang dilakukan.

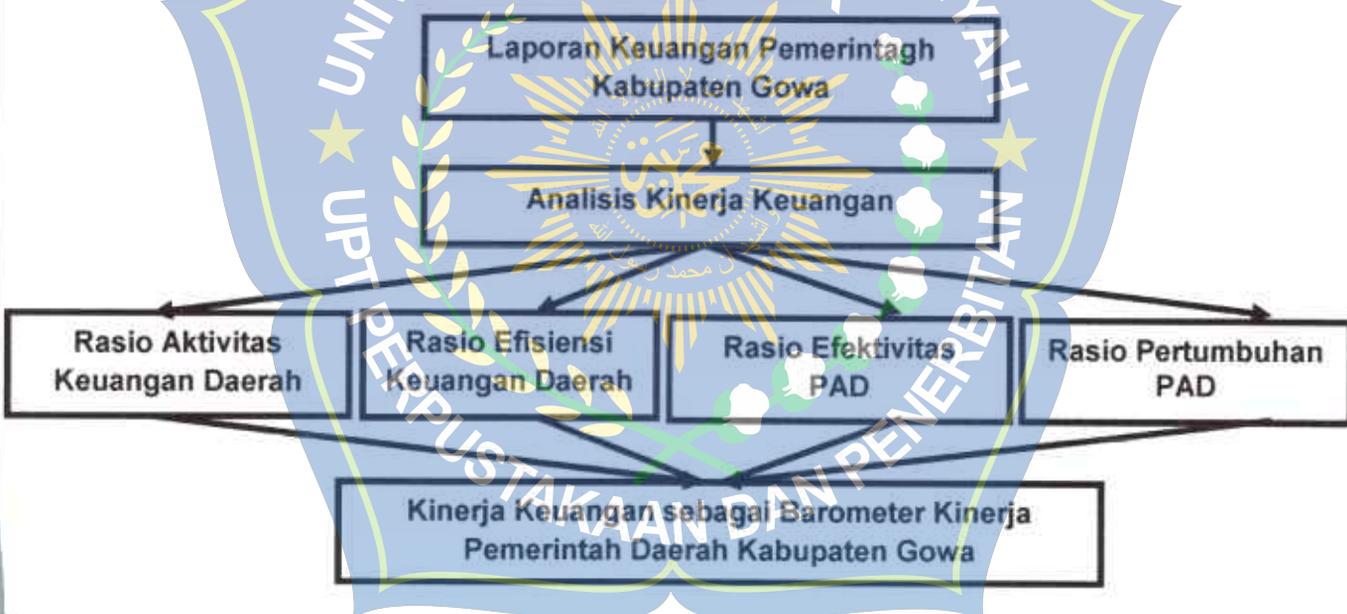
#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan wadah yang dipakai guna mendapatkan data atau informasi utama dalam suatu kajian atau penelitian. Yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini sendiri yakni LKPD Kabupaten Gowa periode anggaran 2016-2020.

## E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran atau desain penelitian yang akan dilakukan dengan menyajikan alur yang didasarkan pada landasan-landasan teoretis yang digunakan. Penelitian ini sendiri ingin mengkaji kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa selama periode 2016-2020 dengan menggunakan empat rasio keuangan yakni rasio efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan PAD. Hasil analisis rasio tersebut untuk melihat sejauh mana Pemerintah Daerah mampu memaksimalkan kinerja keuangannya. Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teoretis yang telah disajikan, maka kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah jenis penelitian yang intinya menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif, bagaimana peneliti menganalisis rasio keuangan sebagai barometer Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Gowa.

##### 2. Pendekatan Penelitian Interpretif

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretif dengan metode deskriptif. Pendekatan interpretif merupakan suatu pengembangan paradigma yang berfokus pada subjektivitas socio-kultural dan berupaya memberikan pemahaman bagi desain riset yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencakup ide-ide filosofi yang memberi ciri khas dalam memberikan pemahaman serta penjelasan terkait isu-isu filo-sosiologi berdasarkan tinjauan atau perspektif tertentu (Latuconsina, 2016).

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang beralamat di Jln. Tumahurung Raya No. 2, Kec. Somba Opu, Sungguminasa.

#### C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data objek sangat relevan dengan penelitian ini, di mana pemerolehannya dilakukan via pendokumentasian dokumen, publikasi, laporan keuangan, dan hal sejenis lainnya (Indriantoro dan Supomo,

## MASA KERAJAAN

Pada tahun 1320 Kerajaan Gowa terwujud atas persetujuan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang-Kasuwiyang dan merupakan kerajaan kecil yang terdiri dari 9 Kasuwiyang yaitu Kasuwiyang Tombolo, Lakiyung, Samata, Parangparang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero.

Pada masa sebagai kerajaan, banyak peristiwa penting yang dapat dibanggakan dan mengandung citra nasional antara lain Masa Pemerintahan I Daeng Matanre Karaeng Imannuntungi Karaeng Tumapa'risi Kallonna berhasil memperluas Kerajaan Gowa melalui perang dengan menaklukkan Garassi, Kalling, Parigi, Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lempangang, Mandalle dan lain-lain kerajaan kecil sehingga Kerajaan Gowa meliputi hampir seluruh dataran Sulawesi Selatan.

Di masa kepemimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallonna tersebutlah nama Daeng Pamatte selaku Tumailalang yang merangkap sebagai Syahbandar, telah berhasil menciptakan aksara Makassar yang terdiri dari 18 huruf yang disebut Lontara Turiolo. Pada tahun 1051 H atau tahun 1605 M, Dato Ribandang menyebarkan Agama Islam di Kerajaan Gowa dan tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 1051 H atau 20 September 1605 M, Raja I Mangerangi Daeng Manrabia menyatakan masuk agama Islam dan mendapat gelar Sultan Alauddin. Ini kemudian diikuti oleh Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka dengan gelar Sultan Awwalul Islam dan beliaulah yang mempromosikan shalat Jum'at untuk pertama kalinya.

Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin Raja Gowa ke XVI dengan gelar Ayam Jantan dari Timur, memproklamirkan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim

yang memiliki armada perang yang tangguh dan kerajaan terkuat di Kawasan Indonesia Timur.

Pada tahun 1653 – 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijaksanaan Gowa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari VOC yang menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Akibat peperangan yang terus menerus antara Kerajaan Gowa dengan VOC mengakibatkan jatuhnya kerugian dari kedua belah pihak, oleh Sultan Hasanuddin melalui pertimbangan kearifan dan kemanusiaan guna menghindari banyaknya kerugian dan pengorbanan rakyat, maka dengan hati yang berat menerima permintaan damai VOC.

Pada tanggal 18 November 1667 dibuat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya (Cappaya ri Bungaya). Perjanjian tidak berjalan langgeng karena pada tanggal 9 Maret 1668, pihak Kerajaan Gowa merasa dirugikan. Raja Gowa kembali dengan heroiknya mengangkat senjata melawan Belanda yang berakhir dengan jatuhnya Benteng Somba Opu secara terhormat. Peristiwa ini mengakar erat dalam kenangan setiap patriot Indonesia yang berjuang gigih membela tanah airnya.

Sultan Hasanuddin bersumpah tidak sudi bekerja sama dengan Belanda dan pada tanggal 1 Juni 1669 meletakkan jabatan sebagai Raja Gowa ke XVI setelah hampir 16 tahun melawan penjajah. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 Sultan Hasanuddin mangkat dalam usia 36 tahun. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara, maka dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973 tanggal 16 Nopember 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi penghargaan sebagai Pahlawan Nasional

## MASA KEMERDEKAAN

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur.

Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar.

Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1957 sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 mencabut Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1957 dan menegaskan Gowa sebagai Daerah Tingkat II yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk operasionalnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P/72/24 tanggal 6 Pebruari 1957 mengangkat Andi Ijo Karaeng Lalolang sebagai Kepala Daerah yang memimpin 12 (dua belas) Daerah bawahan Distrik yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan kerja pemerintahan yang disebut koordinator. Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016, serta Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merupakan badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi secara Efektif dan Efisien tersebut, telah ditetapkan aturan bagi para pemegang Jabatan Struktural maupun Non Struktural sebagai Perangkat Daerah dan Unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

## **2. Visi, Misi**

### **a. Visi Perusahaan.**

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Handal dan Akuntabel Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

### **b. Misi Perusahaan**

1. Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
3. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah.

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN GOWA PROV. SULSEL**



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

### 3. Struktur Organisasi Dan Pembagian Tugas

#### a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengeioaian keuangan Daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

#### b. Tugas Dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa terdiri atas:

##### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugasPelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah.

- a. Pelaksanaan adminlstrasi Badan.
- b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyeienggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan.
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian.
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

## 3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran menyeienggarakan fungsi:

- a. Merencanakan operasional kerja bidang anggaran berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan penyusunan APBD, pengendalian dan penatausahaan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan otoritas DPA-SKPD.
- d. Menyella pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan APBD, Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran serta Sub. Bidang Otorisasi DPA-SKPD.

#### 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyeienggarakan fungsi:

- a. Merencanakan operasional kerja Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Pengelolaan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah serta Pengelolaan Kas Daerah.

#### 5. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset Daerah menyeienggarakan fungsi:

- a. Merencanakan operasional kerja Bidang Aset Daerah berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Kebutuhan Aset, Anallsa Aset serta Mutasi dan Penghapusan Aset.

## B. Statistik Deskriptif Data

Catatan Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan. Laporan PAD selalu melaporkan laporan target dan realisasi PAD dalam dua periode yaitu periode tahun berjalan dan periode tahun sebelumnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

### 1. Statistik Data

Catatan Akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menyajikan laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas. Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa sampel penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dari tahun 2016 sampai 2020. Adapun komponen data penelitian sebagai berikut:

#### a. Komponen Belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memperoleh Aset tetap dan atau Aset lainnya untuk keperluan keperluan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh Masyarakat Umum. Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum. Adapun komponen belanja modal berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.1 sebagai berikut:

## 6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi menyetenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan operasional kerja Bidang Akuntansi berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercapai kelancaran tugas.
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas Sub. Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Sub. Bidang Akuntansi Aset dan Sub. Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
- e. Mengatur urusan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Penyusunan Laporan Keuangan.
- g. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Akuntansi;

Dalam menyetenggarakan tugas bidang dibantu oleh tiga sub bidang terdiri dari:

1. Subbid Perencanaan Kebutuhan
2. Subbid Anallsa Asset
3. Subbid Mutasi dan Penghapusan Asset

**Tabel 4.1**  
**Belanja Modal Pemda Kab. Gowa**  
**Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

Tahun	BELANJA MODAL					Total Belanja Modal
	Belanja Tanah	Belanja peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja jalan, irigasi dan Jaringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	
2016	2.693.942.500	18.525.341.115	43.037.571.868	90.089.501.502	421.800.000	155.768.156.985
2017	2.913.564.500	19.665.762.392	37.623.419.817	105.799.117.152	2.638.738.255	168.765.462.116
2018	5.184.990.800	30.971.762.950	40.814.881.794	105.116.541.229	271.424.900	182.359.601.673
2019	844.515.450	46.554.858.175	40.956.433.588	155.190.237.527	2.042.370.000	245.188.421.040
2020	4.652.000.000	35.724.193.547	32.035.717.114	33.523.082.594	7.069.977.254	173.007.970.509

**Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Gowa**

Berdasarkan dari tabel 4.1 dapat diuraikan Belanja Modal Pemda Kabupaten Gowa tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Gowa pada TA 2016 adalah sebesar Rp 155.768.156.985 atau 81,63% dan yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 190.689.790.155.
- b. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Gowa pada TA 2017 adalah sebesar Rp 168.765.462.166 atau 82,63% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 204.244.366.560.
- c. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Gowa pada TA 2018 adalah sebesar Rp 182.359.601.673 atau 81,64% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 223.363.363.880.
- d. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Gowa pada TA 2019 adalah sebesar Rp 245.188.421.040 atau 86,35% dari yang dianggarkan belanja modalsebesar Rp 283.951.111.079.

- e. Realisasi Belanja Modal Pemda Kabupaten Gowa pada TA 2020 adalah sebesar Rp 173.007.970.509 atau 90,91% dari yang dianggarkan belanja modal sebesar Rp 190.312.834.006.

**b. Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun komponen pendapatan asli daerah berdasarkan kebijakan keuangan disajikan 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**PAD Pemda Kab. Gowa**  
**Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

No	Tahun	PAD				Total PAD
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	
1	2013	2.457.847.693	2.653.680.672	7.162.295.947	10.118.165.226	22.391.989.539
2	2014	4.184.916.862	4.184.916.862	7.587.079.072	16.453.937.198	35.602.098.989
3	2015	6.087.786.310	8.750.480.694	9.762.028.920	13.630.717.556	40.231.013.481
4	2016	6.635.495.792	10.672.596.122	10.584.859.991	15.900.777.881	43.793.729.786
5	2017	7.512.613.362	1.527.406.655	11.164.786.664	57.095.279.585	77.300.086.267

Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Gowa

**Table 4.3**  
**Rasio Efektifitas**  
**Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	Target	Realisasi	Rasio Efektifitas
2013	23.572.884.000	22.391.989.539	94,99%
2014	35.742.492.000	35.602.098.989	99,61%
2015	44.634.937.000.	40.231.013.481	90,13%
2016	52.416.704.800	43.793.729.786	83,55%
2017	91.886.920.000	77.300.086.267	84,13%

**Sumber Data: CaLK Pemda Keb. Gowa**

Berdasarkan hasil perhitungan table 4.3 rasio efektifitas dapat dilihat bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar 94,99%, tahun 2017 sebesar 99,61%, tahun 2018 sebesar 90,13%, tahun 2019 sebesar 83,55% dan tahun 2020 sebesar 84,13%. Angka ini menunjukkan bahwa rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Gowa cukup signifikan. Hal disebabkan pemerintah daerah kurang efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.

### 3. Rasio Efesensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 10 persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

**Tabel 4.4**  
**Rasio Efektifitas**  
**Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020**

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	Realisasi	Biaya Pengumutan	%
2013	22.391.989.539	635.297.722	2,84%
2014	35.602.098.989	780.887.744	2,19%
2015	40.231.013.481	875.522.395	2,18%
2016	43.793.729.786	996.838.547	2,28%
2017	77.300.086.267	1.551.242.311	2,01%

**Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Gowa**

Berdasarkan tabel 4.4 rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari 2016 sebesar 2,84%, tahun 2017 sebesar 2,19%, tahun 2018 sebesar 2,18%, tahun 2019 sebesar 2,28% dan tahun 2020 sebesar 2,01%. Adapun mengalami kenaikan pada tahun pada tahun 2019 yang berarti adanya penurunan kinerja pada pemerintah, lalu pada tahun 2017 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan.

#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat.

**Tabel 4.5**  
**Rasio Aktivitas**  
**Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

Tahun	Rasio Aktivitas		
	APBD	Belanja Modal	Rasio
2013	190.689.790.155	155.768.156.985	81,69%
2014	204.244.366.560	168.765.462.166	82,63%
2015	223.363.363.880	182.359.601.673	81,64%
2016	283.951.111.079	245.188.421.040	86,35%
2017	190.312.834.006	173.007.970.509	90,91%

**Sumber Data:** CaLK Pemda Kab. Gowa

Berdasarkan tabel 4.5 rasio aktivitas diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan relative besar karena dari perhitungan rasio dari 2016 sebesar 81,69%, tahun 2017 sebesar 82,63%, tahun 2018 sebesar 81,64%, tahun 2019 sebesar 86,35% dan tahun 2020 sebesar 90,91%. Adapun besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal terhadap APBD dan itupun rasionya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

#### **5. Rasio Pertumbuhan**

Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

**Tabel 4.6**  
**Rasio Pertumbuhan**  
**Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

Tahun	APBD	Pertumbuhan	Belanja Modal	Pertumbuhan
2013	190.689.790.155	5,10	155.768.156.985	6,12%
2014	204.244.366.560	7,11%	168.765.462.166	8,34%
2015	223.363.363.880	9,36%	182.359.601.673	8,06%
2016	283.951.111.079	27,13%	245.188.421.040	34,45%
2017	190.312.834.006	-32,98%	173.007.970.509	-29,44%

**Sumber Data: CaLK Pemda Kab. Gowa**

Berdasarkan dari tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa berdasarkan perhitungan rasio dari 2016 sebesar -%, tahun 2017 sebesar 7,11%, tahun 2018 sebesar 9,36%, tahun 2019 sebesar 27,13% dan tahun 2020 sebesar -32,98%. Adapun rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa tahun 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tahun 2020 penurunannya negatif hal ini disebabkan adanya covid 19 sehingga pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan Pertumbuhan belanja modal Kabupaten Gowa berdasarkan perhitungan rasio dari 2016 sebesar -%, tahun 2017 sebesar 8,34%, tahun 2018 sebesar 8,06%, tahun 2019 sebesar 34,45% dan tahun 2020 sebesar -29,44%. Adapun rasio pertumbuhan belanja modal Kabupaten Gowa tahun 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tahun 2020 penurunannya negatif hal ini disebabkan adanya covid 19 sehingga pendapatan mengalami penurunan.

## C. Pembahasan

### 1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio efektivitas.

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasio efektivitas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar 94,99%, tahun 2017 sebesar 99,61%, tahun 2018 sebesar 90,13%, tahun 2019 sebesar 83,55% dan tahun 2020 sebesar 84,13%. Angka ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Gowa cukup signifikan. Hal disebabkan pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rasio Efisiensi.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putra (2018) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012" yang menyatakan bahwa Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa tergolong rendah sekali, rata-rata tingkat efektivitas PAD dan tahun 2010-2012 tergolong kurang efektif, rata-rata tingkat efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa tergolong tidak efisien, dan rata-rata tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif.

## **2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan Rasio Efisiensi**

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari 2016 sebesar 2,84%, tahun 2017 sebesar 2,19%, tahun 2018 sebesar 2,18%, tahun 2019 sebesar 2,28% dan tahun 2020 sebesar 2,01%. Adapun mengalami kenaikan pada tahun pada tahun 2019 yang berarti adanya penurunan kinerja pada pemerintah, lalu pada tahun 2017 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan Rasio Aktivitas.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega Oktavia Ropa (2018) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan." yang menyatakan bahwa Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, aktivitas, dan pertumbuhan dapat dikatakan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Selatan tergolong cukup baik.

## **3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio aktivitas**

Hasil temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa rasio aktivitas diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa dapat dikatakan relative besar karena dari perhitungan rasio dari 2016 sebesar 81,69%,

tahun 2017 sebesar 82,63%, tahun 2018 sebesar 81,64%, tahun 2019 sebesar 86,35% dan tahun 2020 sebesar 90,91%. Adapun besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja belanja modal terhadap APBD dan itupun rasionya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2018) yang berjudul "Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu" yang menyatakan bahwa Rasio Aktivitas tahun anggaran 2009-2012 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja rutin lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012.

#### **4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-2020 berdasarkan rasio pertumbuhan**

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa berdasarkan perhitungan rasio dari 2016 sebesar -%, tahun 2017 sebesar 7,11%, tahun 2018 sebesar 9,36%, tahun 2019 sebesar 27,13% dan tahun 2020 sebesar -32,98%. Adapun rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Gowa tahun 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tahun 2020 penurunannya negatif hal ini sebabkan adanya covid 19 sehingga pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan Pertumbuhan belanja

modal Kabupaten Gowa berdasarkan perhitungan rasio dari 2016 sebesar -%, tahun 2017 sebesar 8,34%, tahun 2018 sebesar 8,06%, tahun 2019 sebesar 34,45% dan tahun 2020 sebesar -29,44%. Adapun rasio pertumbuhan belanja modal Kabupaten Gowa tahun 2016-2019 menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun mengalami peningkatan dan tahun 2020 penurunannya negatif hal ini disebabkan adanya covid 19 sehingga pendapatan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juddy J. Pillat dan J. Morasa (2017) yang berjudul "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015" yang menyatakan bahwa kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD Kota Manado Tahun 2011-2015, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Kota Manado berada dalam kondisi yang baik dengan trend positif atau baik berdasarkan rasio pertumbuhan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta analisis yang telah diuraikan, serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-tahun 2020 berdasarkan rasio efektivitas cukup signifikan.
2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-tahun 2020 berdasarkan rasio efisiensi sangat efisien.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-tahun 2020 berdasarkan rasio aktivitas relative besar.
4. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2016-tahun 2020 berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijabarkan beberapa saran untuk menyajikan penelitian yang lebih berkualitas di masa mendatang, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah disarankan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah

2. Untuk pemerintah selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan pendapat dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sehingga objek penelitian lebih berkualitas.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempersiapkan biaya, mempersiapkan lebih banyak waktu dan tenaga agar proses penelitian berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan dan tepat waktu dalam penyajiannya sehingga hasil penelitian lebih berkualitas.

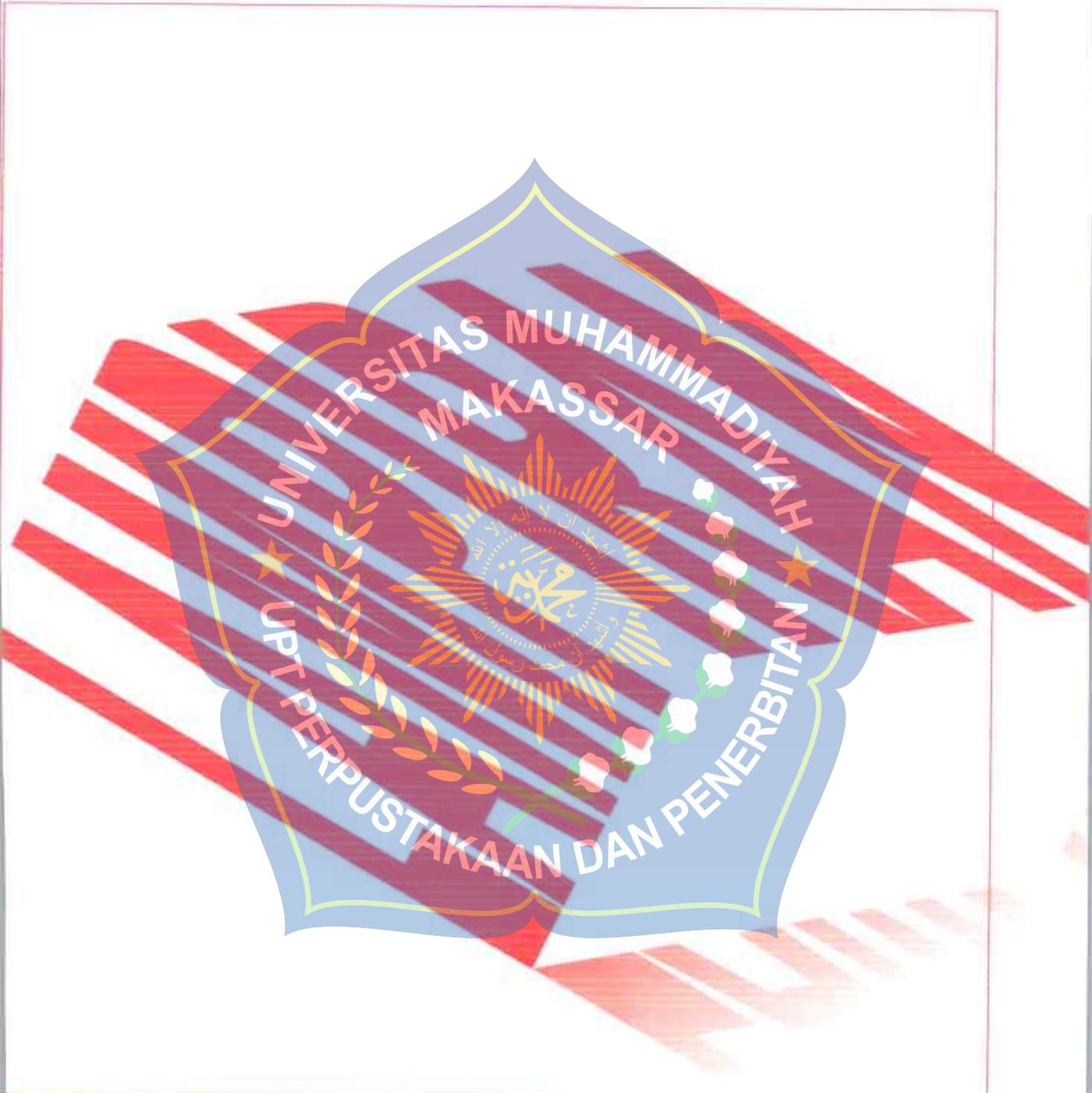


## DAFTAR PUSTAKA

- Alvionita, W. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. 3(005), 59–71.
- Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan
- Erna Rahmawati Ni Ketut, Putra I wayan, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012" E-jurnal Vol.15, No 3.
- Halim Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendro Sumarjo. (2010). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ibnu Syamsi. (2013). "Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional." Jakarta: CV Rajawali.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 2004. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara". Kementerian BUMN
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. "Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 4"
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Kusumadewi Wahidah Niken, Iiat Ventie, 2018. "Analisis Kineja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2012-2016". Jurnal EMBA. Vol 4, No.1, Maret 2018, Hal. 634-644.
- Latuconsina, Y. M. 2016. Mengungkap Fenomena Potongan Angsuran Murabahah di Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. 17(2): 132-140.
- Lubis, P. K. D. dan N. Hafni. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *KITABAH*, 1(1): 21-45.
- Majid, Jamaluddin. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.
- Mardiasmo, 2002. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta:

Penerbit Andi.

- Menteri Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Menteri Dalam Negeri
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2006. "Undang-undang Nomor 18 ayat 2 tahun 1945 Tentang Otonomi Daerah" Kepala Peraturan Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 4(33), 55–66.
- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1): 55-66.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011–2015. 06, 45–56.
- Pilat, J. J. dan J. Morasa. 2017. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015.
- Rahmawati Ni Ketut Erna, Putra I Wayan, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-1012". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 15. No.3. Juni.
- Ropa Mega Oktavia. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA*. Vol 4, No.2 Juni, Hal. 738-747.
- Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Bisnis". Cetakan XVII, CV Alfabet, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung; Alfabeta.
- Suprpto Tri, 2006. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2002-2004" Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah kota mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Tobi Regina Maria, Idayanti Farida, 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.5, No.8. Agustus.
- Wenny Cherrya Dhia, 2012. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan" *Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol.2. No.1 September.



No	Tahun	BELANJA MODAL					Total Belanja Modal
		Belanja Tanah	Belanja peralatan dan Mesin	Belanja Gedung dan Bangunan	Belanja jalan, irigasi dan Jaringan	Belanja Aset Tetap Lainnya	
1	2016	2.693.942.500	19.525.341.115	43.037.571.868	90.089.501.502	421.800.000	155.768.156.985
2	2017	2.913.564.500	19.665.762.392	37.623.419.817	105.799.117.152	2.638.738.255	168.765.462.116
3	2018	5.184.990.800	30.971.762.950	40.814.881.794	105.116.541.229	271.424.900	182.359.601.673
4	2019	844.515.450	46.554.858.175	40.556.439.888	155.190.237.527	2.042.370.000	245.188.421.040
5	2020	4.652.000.000	35.734.193.547	32.035.717.114	93.529.082.594	7.056.977.254	173.007.970.509

Tahun	PAD				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	
2013	2.457.847.693	2.653.680.672	7.162.295.947	10.118.165.226	22.391.989.539
2014	4.184.916.862	4.184.916.862	7.587.079.072	16.453.937.198	35.602.098.989
2015	6.087.786.310	8.750.480.694	9.762.028.920	15.630.717.556	40.231.013.481
2016	6.635.495.792	10.672.596.122	10.584.859.991	15.900.777.881	43.793.729.786
2017	7.512.613.362	1.527.406.655	11.164.786.664	57.095.279.585	77.300.086.267

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	Target	Realisasi	Rasio Efektifitas
2013	23.572.884.000	22.391.989.539	94,99%
2014	35.742.492.000	35.602.098.989	99,61%
2015	44.634.937.000	40.231.013.481	90,13%
2016	52.416.704.800	43.793.729.786	83,55%
2017	91.886.920.000	77.300.086.267	84,13%

Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
	Realisasi	Biaya Pemumutan	%
2013	22.391.989.539	635.297.722	2,84%
2014	35.602.098.989	780.887.744	2,19%
2015	40.231.013.481	875.522.395	2,18%
2016	43.793.729.786	996.838.547	2,28%
2017	77.300.086.267	1.551.242.311	2,01%

Tahun	Rasio Aktivitas		
	APBD	Belanja Modal	Rasio
2013	190.689.790.155	155.768.156.985	81,69%
2014	204.244.366.560	168.765.462.166	82,63%
2015	223.363.363.880	182.359.601.673	81,64%
2016	283.951.111.079	245.188.421.040	86,35%
2017	190.312.834.006	173.007.970.509	90,91%

Tahun	APBD	Pertumbuhan	Belanja Modal	Pertumbuhan
2013	190.689.790.155	-	155.768.156.985	-
2014	204.244.366.560	7,11%	168.765.462.166	8,34%
2015	223.363.363.880	9,36%	182.359.601.673	8,06%
2016	283.951.111.079	27,13%	245.188.421.040	34,45%
2017	190.312.834.006	-32,98%	173.007.970.509	-29,44%



Wawancara dengan kepala keuangan

# BAB I Suherni105731135616

## ORIGINALITY REPORT

<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>
<b>SIMILARITY INDEX</b>	<b>INTERNET SOURCES</b>	<b>PUBLICATIONS</b>	<b>STUDENT PAPERS</b>

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.uny.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>2%</b>

code quotes  
code matches

On Exclude bibliography On  
< 2



# BAB II Suherni105731135616

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>www.researchgate.net</b> Internet Source	<b>9%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Or Exclude bibliography  Or



# SAB III Suherni 105731135616

## ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
<b>SIMILARITY INDEX</b>	<b>INTERNET SOURCES</b>	<b>PUBLICATIONS</b>	<b>STUDENT PAPERS</b>

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Fadhilah Nuraini, Kiagus Andi, Yunia Amelia, Fitra Dharma. "PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PESISIRAN PROPINSI DI INDONESIA", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2019</b> Publication	<b>2%</b>

Exclude quotes  
Exclude matches

On Exclude bibliography



## BAB IV Suherni 105731135616

### ORIGINALITY REPORT

<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
<b>SIMILARITY INDEX</b>	<b>INTERNET SOURCES</b>	<b>PUBLICATIONS</b>	<b>STUDENT PAPERS</b>

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>



**BAB V Suherni 105731135616****ORIGINALITY REPORT**

<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>SIMILARITY INDEX</b>	<b>INTERNET SOURCES</b>	<b>PUBLICATIONS</b>	<b>STUDENT PAPERS</b>

**PRIMARY SOURCES**

Exclude quotes     Exclude bibliography     Exclude matches < 2%



## BIOGRAFI PENULIS



**SUHERNI** nama panggilan erni, Makassar , 21 juni 1998 beralamat di jl. Andi paturungi kota Makassar provisi Sulawesi selatan. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak H. muh said sila dan ibu HJ. Nuraeni dg senga. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SD neg Timbuseng 2 dan Tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Neg 15 Makassar dan tamat pada tahun 2013 . lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMA neg 20 Makassar dan menamatkan pendidikan pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan strata (1) Di Universitas muhammadiyah Makassar pada fakultas ekonomi dan bisnis tepatnya pada program studi S1 Akuntansi

